

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi Desa merupakan suatu *condition sine quanon* (sesuatu yang tidak dapat tidak ada). Tanpa adanya otonomi, maka organisasi pemerintahan terendah itu bukan lagi desa. Desa selalu mengandung unsur otonomi. Hilangnya otonomi berarti hilangnya sifat khas dan ciri desa, dengan kata lain wilayah itu tidak merupakan desa lagi.

Pada hakikatnya otonomi desa dan otonomi daerah adalah sama yaitu dalam hal penyelenggaraan yang dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Namun selain persamaan terdapat juga perbedaan antara otonomi desa dan otonomi daerah. Perbedaan dimaksud yaitu dalam hal asal-usul kedua otonomi tersebut. Otonomi Desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk (tumbuh di dalam masyarakat) dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa. Otonomi Desa bukan berasal dari pemberian pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi tetapi diperoleh secara tradisional. Sedangkan Otonomi Daerah adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi (sebagai pendistribusian kewenangan dari pemerintah di atasnya). Otonomi Daerah diperoleh secara formal dan pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, dalam otonomi desa terdapat kesan yang kuat bahwa, kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar. ([blog.unila.ac.id/denden/files/2009/07/Pemdes.doc](http://blog.unila.ac.id/denden/files/2009/07/Pemdes.doc))

Pemerintahan desa sebagai suatu kegiatan beroperasi didalam ruang lingkup yang dinamakan sebagai wilayah desa. Wilayah desa dimana di atasnya terdapat suatu masyarakat hukum, dan formal berstatus sebagai wilayah-wilayah administratif terkecil serta merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas yaitu kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Desa sebagai masyarakat hukum biasanya mengalami perkembangan dalam suatu jangka waktu tertentu, yaitu dari sebuah induk desa pecah menjadi anak-anak desa yang memisahkan diri guna membentuk kelompok baru dengan kesatuan tempat tinggal sendiri. Hal ini didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk, sehingga terdapat kebutuhan akan badan (organisasi) baru guna memudahkan kepentingan warga desa yang bersangkutan.

Disamping kepala desa sebagai pimpinan formal, terdapat golongan pimpinan lain yang juga berpengaruh terhadap sifat mental dan tanggapan sosial ekonomis maupun kebudayaan masyarakat desa mereka ini selain tetua desa, termasuk pimpinan dari paguyuban agama, guru/kepala sekolah dan ustadz.

Selain tetua adat, di daerah yang kesukuannya masih kuat, penghulu adat juga berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat sebagai ahli yang mengetahui dan dengan gigih mempertahankan norma-norma adat kesukuan maupun tradisi

budaya lainnya pada suatu kelompok yang bersangkutan yang kadang-kadang memiliki pengaruh lebih besar daripada kepala desa.

Guna menggerakkan dinamika sosial masyarakat desa secara positif serta penanggulangan dinamika yang negatif maka peranan golongan yang dianggap sebagai pemimpin adalah sangat menentukan. Sehubungan dengan dijadikannya gerakan pembangunan masyarakat pedesaan sebagai arah perubahan arah kehidupan baik mental spiritual dan kehidupan ekonomi masyarakat desa maka di perlukan kepala desa yang mampu membawa kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik.

Ketokohan seseorang yang sangat kuat mempengaruhi pilihan politik masyarakat juga sudah sangat memudar. Simbol-simbol tokoh politik, tokoh organisasi, tokoh masyarakat, kiai, dan sebagainya, sekarang terasa kurang mampu mempengaruhi atau membelokkan pilihan politik masyarakat. Masyarakat sudah terasa sekali memiliki pilihan politiknya masing-masing, mencoba melepaskan diri dari kukungan tokoh politik, aliran, maupun partai yang selama ini diikutinya. (<http://imamlirboyo.blogdetik.com>)

Sesuai pendapat Jack C. Plato, bahwa perilaku politik seorang adalah pikiran dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintah. Perilaku politik ini meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi, sikap, keyakinan juga meliputi tindakan yang nyata seperti pemberian suara, protes, dan lobbying. (Sudiono Sastroadmojo;1995)

Sehingga perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam penelitian ini proses tersebut mengacu pada penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang bukan hanya menjamin legitimasi politik dan kredibilitas pemerintah hasil pemilu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dan antusiasme politik yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Begitupun jika pemilu tidak dilaksanakan secara terbuka, bebas, jujur, dan adil dengan system pemilihan yang tidak dapat diterima serta dimengerti masyarakat maka dapat menimbulkan perilaku destruktif atau kekerasan politik dan kerusuhan massa.

Gejala-gejala perilaku politik masyarakat ketika menghadapi pilkades memiliki keterkaitan terhadap pemilih dengan latar belakang pemilih Indonesia yang status pendidikan, intelektual dan status sosial ekonominya adalah masyarakat menengah kebawah. Pola pikir dan pertimbangan akal masyarakat dengan status tersebut sangat mungkin menjadi suatu kalkulasi yang sederhana untuk melihat bahwa yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat di pedesaan ketika pemilihan kepala desa berlangsung.

Dalam kehidupan politiknya, masyarakat desa Waringinsari Barat kerap merasa jenuh dengan penyelenggaraan pilkades yang tidak banyak memberikan kontribusi pada kehidupan mereka untuk dapat hidup secara layak. Contohnya ketika mereka menghadapi pemilihan kepala desa pada tanggal pada 30 April 2011 lalu, hasilnya sangat jelas terlihat. Masyarakat

lebih memilih calon yang sudah pernah terpilih menjadi kepala desa sebelumnya dan mencalonkan kembali menjadi kepala desa pada periode ini.

Berikut ini disajikan data perolehan suara dalam pilkades di desa Waringinsari Barat

No	Nama Calon	Perolehan Suara	Presentase (%)	Penggunaan Surat Suara		Penggunaan Hak Pilih		Jumlah Mata Pilih
				Syah	Tidak Syah	Memilih	Tidak Memilih	
1.	Woto Siswoyo	1.201	61	1.956	528	2.484	1.249	3.733
2.	Agus Wariyanto	755	39					

Tabel 1. Perolehan suara

Dari tabel diatas sangat jelas terlihat yang menjadi masalah menarik yaitu banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebutlah yang membuat penelitian ini sangat menarik untuk diteliti.

Guna menggerakkan dinamika sosial masyarakat desa secara positif serta penanggulangan dinamika yang negatif maka peranan golongan yang dianggap sebagai pemimpin adalah sangat menentukan. Sehubungan dengan dijadikannya gerakan pembangunan masyarakat pedesaan sebagai arah perubahan arah kehidupan baik mental spiritual dan kehidupan ekonomi masyarakat desa maka di perlukan kepala desa yang mampu membawa kehidupan masyarakat desa menjadi lebih baik.

Berdasarkan perkembangan sosial politik melalui pemilu tersebut, terlihat adanya perilaku-perilaku politik yang berkembang pula. Idealnya perilaku politik masyarakat ketika pemilu di negara yang demokratis adalah pemilu yang bercirikan tanpa embel-embel apapun, karena pemegang otoritas

kekuasaan lahir dari adanya mandat atau kepercayaan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memberikan kepercayaan kepada seseorang, atau sekelompok orang yang dinilai memiliki aspirasi sama dan berkemampuan, untuk memimpin, mengatur, dan mengelola negara. Pemilu adalah cara paling sah memperoleh figur terbaik bangsa, dalam batasan periode waktu tertentu, untuk menjadi pemimpin atau menjadi wakil rakyat (sistem presidensial) atau, wakil partai politik (sistem parlementer). Melalui pemilu akan dihasilkan pemerintahan yang tidak semata legal (sah) namun juga legitimate atau memperoleh dukungan nyata dari rakyat. Pemilu adalah konsekuensi logis dari demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Tetapi pada kenyataannya, bahwa perilaku politik masyarakat sekarang telah menjadi lebih pragmatis, artinya perilaku politik masyarakat sekarang lebih mengutamakan segi manfaat dari pemilu itu sendiri yang diharapkan membawa mereka kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Perilaku politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yang berskala nasional maupun lokal tersebut berpengaruh juga terhadap perilaku politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat desa saat ini karena didesak oleh kebutuhan ekonominya dan membuat perilaku politik masyarakat desa cenderung pragmatis pula.

Mayoritas di Indonesia proses pemilihan kepala desa berjalan dengan lancar karena sekarang masyarakat memiliki kesadaran politik yang lebih baik. Hal ini di dasari bahwa di era reformasi sekarang ini pelaksanaan pemilu sudah menjadi agenda rutin bangsa Indonesia. Semua pemimpin bangsa di pilih

melalui jalan pemilu mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, hingga pemilihan kepala desa.

Berdasarkan kondisi-kondisi diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perilaku politik masyarakat desa Waringinsari Barat dalam pemilihan kepala desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apakah yang menjadi penyebab masyarakat desa Waringinsari Barat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2011?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada dilokasi penelitian, maka penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab masyarakat desa Waringinsari Barat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2011.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Praktis**

Bagi instansi terkait, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah kelurahan atau desa Waringinsari Barat dan para pelaku politik di desa Waringinsari Barat dalam melakukan kegiatan politiknya.

## 2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan dibidang pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa.